

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Perang Dunia kedua, perdagangan senjata mulai meluas di kawasan Asia yang dalam perkembangannya mengakibatkan negara-negara berlomba untuk modernisasi militer. Faktor yang mendorong modernisasi militer terutama bagi Indonesia antara lain terjadi pertumbuhan ekonomi, pasukan militer yang kuat untuk memberikan keamanan, rivalitas negara-negara Kawasan Asia Timur yang turut mengarah pada modernisasi militer, revolusi dalam militer dan tersedianya teknologi militer generasi baru diwujudkan melalui pembangunan industri pertahanan.ⁱ

Pembangunan industri pertahanan ini membentuk sebuah rantai pertahanan global, yakni dari negara produsen pertama yang membuat produk asli kemudian dijual pada negara kedua yang dapat bertindak sebagai produsen kedua dan seterusnya. Negara bukan produsen pertama melakukan kerja sama dengan negara yang memiliki kapabilitas untuk membuat senjata seperti kerja sama pengembangan bersama jet tempur antara Korea Selatan dan Indonesia. Maka, pembangunan industri pertahanan menjadi perhatian negara-negara lain karena mencakup aspek pertahanan dan ekonomi yang dapat menjadi nilai tawar bagi negara dalam konteks hubungan internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas dan berbatasan dengan 10 negara, sehingga memiliki potensi ancaman.ⁱⁱ Potensi ancaman baik internal maupun eksternal dapat dialami Indonesia seperti

ketegangan dengan negara-negara perbatasan begitu juga pengaruh dari negara-negara kuat terhadap sistem internasional.

Industri pertahanan Indonesia mulai berkembang pada akhir tahun 1970an, tetapi kemudian mengalami kemunduran sejak momentum krisis moneter tahun 1997. Faktor kemunduran industri pertahanan antara lain adanya embargo persenjataan oleh Amerika Serikat dan negara sekutu dan dampak krisis moneter tahun 1997 terhadap politik domestik. Akibatnya, Indonesia tidak dapat menggunakan alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan Keamanan) untuk kepentingan nasional. Maka, Indonesia menggiatkan pembangunan industri pertahanan lokal.

Indonesia menunjang kebutuhan alutsista melalui dukungan anggaran pertahanan belanja pemerintah, alokasi anggaran fungsi pertahanan pada periode 2008-2018 meningkat dari Rp. 5,6 triliun tahun 2008 menjadi Rp. 57,7 triliun pada tahun 2013 kemudian menjadi 107,7 triliun tahun 2018.ⁱⁱⁱ Di sisi lain, Indonesia masih mengutamakan sektor pembangunan infrastruktur dan revitalisasi industri. Maka, Indonesia menggunakan alternatif kerja sama pertahanan yang diselenggarakan pemerintah nasional terhadap pemerintah negara lain dengan mengutamakan syarat transfer teknologi untuk meringankan beban ekonomi.

Indonesia dan Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973 yang beberapa diantaranya adalah kerja sama di bidang pertahanan. Termasuk Korea Selatan, ada 21 negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia di bidang pertahanan berdasarkan perjanjian internasional saat ini.

Beberapa diantaranya adalah Azerbaijan, UAE, Guinea Bissau, Perancis, Vietnam, UK, Jerman, Spanyol, Polandia, Pakistan, Thailand, Timor Leste, Belanda, India, USA, Ukraina, Ceko, Nigeria, Afrika Selatan, Belarus. Salah satu kerja sama dengan Korea Selatan dalam upaya peningkatan kapabilitas militer adalah pengembangan bersama untuk pesawat tempur dalam 10 tahun terakhir sejak ditandatanganinya *Letter of Intent* tahun 2009.

Dipihak lain, Korea Selatan membangun pertahanannya secara berkelanjutan sejak tahun 1970-an. Proyek Yulgok (1974-1994) yang digagas oleh Park Chung Hee sebagai awal mula dari modernisasi militer Korea Selatan. Tindakan Korea Selatan untuk mengembangkan industri pertahanan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap senjata Amerika Serikat. Potensi ancaman yang ada di Semenanjung Korea dan ketidakpastian pada situasi internasional mendorong upaya pembangunan industri pertahanan negara tersebut.

Angkatan bersenjata Korea Selatan memprioritaskan modernisasi peralatan militer melalui perencanaan jangka menengah 5 tahun (2001-2005) daripada mencegah kategori ancaman mendesak. Alasannya, pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan kebijakan reunifikasi Korea sehingga menghindari tindakan yang dapat memicu konfrontasi antara dua Korea. Program yang diluncurkan pada era Presiden Kim Dae Jung adalah pembuatan pesawat tempur *next-generation* (F-X) yang selanjutnya menjadi landasan diadakannya program KF-X.

Korea Selatan menggagas kerja sama pengembangan bersama KF-X kepada Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KF-X/IF-X dengan MoU yang ditandatangani pada tahun 2010. Kesepakatan ketentuan biaya program kerja sama antara lain Korea Selatan dibebankan sebesar 60 %, PT DI sebesar 20 % dan KAI sebesar 20 % dari total biaya pengembangan.^{iv} Kerja sama terdiri dari tiga tahap antara lain tahap TDP 2010-2012 (*Technology Development Phase*), tahap EMDP 2015-2023 (*Engineering and Manufacturing Development Phase*) dan tahap PDP 2025-2026 (*Production Development Phase*). Namun kerja sama pengembangan tersebut mengalami beberapa kendala.

Hambatan kerja sama antara lain penundaan, masalah pada perizinan transfer teknologi dan pembayaran. Pertama, penundaan tahun 2013 dilakukan secara sepihak oleh Korea Selatan karena faktor pertimbangan teknologi yang belum siap, biaya proyek yang diperkirakan tidak memiliki keuntungan ekonomi dan memakan waktu lebih dari yang ditentukan yakni sebelum tahun 2025.^v Kedua, masalah perizinan transfer teknologi berupa penolakan 4 teknologi inti milik Amerika Serikat yang akan digunakan KF-X/IF-X pada tahun 2015. Ketiga, keterlambatan pembayaran iuran pada tahap pengembangan oleh Indonesia pada tahun 2017.

Respon Korea Selatan adalah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan mendesak Indonesia mengenai kewajiban pembayaran pengembangan bersama. Kim Jong-Dae, salah satu anggota Komite Pertahanan Majelis Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran oleh Indonesia dapat menunda proyek KF-X/IF-X karena biaya yang belum

dibayar Indonesia akan dibebankan pada kontraktor utama yaitu KAI.^{vi} Meskipun demikian, lembaga Administrasi Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) menyatakan bahwa kerja sama ini masih berlanjut.

Perkembangan selanjutnya, Indonesia mengajukan renegotiasi kontrak pengembangan bersama KF-X/IF-X pada bulan oktober 2018 yang dilandasi faktor ekonomi negara. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menyatakan alasan pertama, untuk menghemat cadangan devisa negara dengan tujuan menjaga stabilitas nilai rupiah yang dapat berdampak pada kepercayaan investor terhadap Indonesia. Kedua, kondisi beban anggaran belanja negara cukup besar dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kerja sama mengalami penundaan selama negosiasi berlangsung dengan batas waktu 12 bulan dimulai sejak Oktober 2018.

Berdasarkan paparan persoalan diatas, industri pertahanan negara perlu didukung dengan pemenuhan anggaran pertahanan untuk keperluan alutsista. Namun pada praktiknya, tidak dapat dipisahkan dengan faktor politik dan ekonomi-pertahanan. Pertahanan memiliki kekuatan sebagai penunjang negara, yaitu menciptakan situasi aman, sehingga pelaku ekonomi dapat melakukan aktivitas. Selanjutnya, memudahkan negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain karena negara memiliki nilai atau posisi untuk melakukan tawar-menawar pada suatu persoalan.

Di lain pihak, Korea Selatan memiliki hubungan aliansi dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Pengembangan jet tempur KF-X sebagian berasal dari offset pembelian F-35 antara Korea Selatan dengan Lockheed Martin,

Amerika Serikat. Maka, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat demi kelancaran pelaksanaan kerja sama.

Sementara itu, posisi tawar Indonesia berdasarkan kontrak dalam kerja sama pengembangan bersama adalah tidak kuat dibandingkan dengan Korea Selatan. Apabila kontrak diserahkan ke produsen luar negeri, artinya Korea Selatan memiliki kuasa lebih atas produk alutsista tersebut. Oleh karena itu, penulis melihat fenomena ini menarik untuk dibahas mengenai analisis kerja sama pengembangan KF-X/IF-X yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia melalui Korea Selatan pada tahun 2013 sampai 2018.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan melalui kerja sama pengembangan bersama KF-X/IF-X periode 2013-2018 ?

1.1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Rentang waktu tersebut dipilih karena terjadi penundaan kerja sama pengembangan KF-X/IF-X pada tahun 2013. Penulis melihat tahun 2013 merupakan salah satu bagian dari dinamika kerja sama yang akan menuntun pada interaksi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang pertahanan. Sedangkan, tahun 2018 dipilih menjadi batas akhir penelitian sebagai zona penelitian yang studi kasusnya masih memiliki kemungkinan untuk berlanjut.

Penulis membatasi lingkup penelitian pada kebijakan pertahanan Indonesia yang diambil terhadap kerja sama pengembangan KF-X/IF-X. Penulis juga melihat keterkaitan antara sektor ekonomi dan pertahanan Indonesia dan korelasinya terhadap hubungan politik kedua negara.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka maksud dari penelitian ini adalah :

Mengetahui diplomasi pertahanan Indonesia melalui pendekatan historis interaksi antara Indonesia dan Korea Selatan yang membentuk tindakan Indonesia dalam menyikapi kerja sama pertahanan pengembangan bersama KFX/IFX.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi dalam bidang akademik yaitu ilmu hubungan internasional. Sesuai dengan judul yang menjadi pembahasan penelitian, pun dapat menjadi referensi atau rujukan mengenai hubungan bilateral negara pada kajian diplomasi pertahanan. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap studi ini secara praktis dapat memberikan manfaat mengenai tindakan yang dilakukan dalam kerja sama sebuah negara pada

pengembangan industri pertahanan terutama bagi negara berkembang. Hasil dari penelitian ini dapat melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan *joint defence* antar negara khususnya Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan pandangan mengenai hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang pertahanan.

1.4 Studi Literatur

1.4.1 Al-Fadhat, Faris, Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan : Ketahanan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME : 209/1400 (Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 25/No. 3/2019/hal. 373-392)

Artikel ini meneliti tentang kebijakan pengadaan kapal selam DSME 209/1400 dan dampaknya terhadap politik pertahanan serta maritim Indonesia. Prioritas kerja sama ini adalah transfer teknologi kapal selam Korsel ke Indonesia. Korea Selatan dipilih karena biaya untuk pemesanan 3 kapal lebih murah daripada membeli kapal selam dari Eropa.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengadaan kapal selam merupakan upaya memperkuat visi pengadaan kapal selam Indonesia pada tahun 2024. Namun kerja sama bilateral ini memiliki hambatan terutama dari sektor kesiapan sumber daya manusia Indonesia. Indonesia harus mampu mengoptimalkan pengadaan alutsista dengan anggaran yang terbatas.

Artikel ini mendukung penelitian untuk diskusi mengenai kerja sama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan khususnya dibidang industri

pertahanan. Pembedanya, penelitian cenderung fokus pada proses kerja sama pengembangan bersama KF-X/IF-X. Penelitian mencakup seputar hubungan pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam perkembangan kerja sama pengembangan bersama tersebut.

1.4.2 Chairil, Tangguh., Dedy S. Sinaga, Annisa I. Febrianti; Relationship Between Military Expenditure and Economic Growth in ASEAN : Evidence from Indonesia (Journal of ASEAN Studies, Vol. 1/No. 2/2013/ hal. 106-121)

Artikel ini meneliti permasalahan mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dengan anggaran pertahanan. Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model Augmented Sollow Growth sebagai acuan penelitiannya. Hasil dari artikel jurnal ini adalah hubungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan anggaran pertahanan memberikan dampak positif dan bersifat timbal balik.

Artikel ini mendukung data mengenai korelasi antara jumlah anggaran pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembedanya, penelitian akan memberikan gambaran yang melibatkan unsur lain yang juga menjadi penentu tindakan yang diambil Indonesia terhadap kerja sama pengembangan bersama KF-X/IF-X.

1.4.3 Moch Faisal Karim; Middle Power, Status-seeking and Role Conceptions: the Cases of Indonesia and South Korea (Australian

Journal of International Affairs, Routledge Taylor and Francis Group, 2018)

Artikel ini menjelaskan pemahaman pada peran dan tindakan negara-negara *middle power* melalui *role theory*. Ciri dasar *middle power* adalah kemampuan dan aspirasi serta kemauan untuk mendapatkan sumber ideasional dalam memberikan pengaruh pada tingkat global meskipun ada kendala secara material. Konsep ‘peran’ di konstruksi oleh dua proses yakni *alter expectation* dan *ego expectation* melalui pengalaman sejarah.

Hasil penelitian artikel bahwa pembuat kebijakan luar negeri mengonsep dan menerapkan beberapa perannya dipengaruhi oleh pengalaman sejarah untuk mencapai status *middle power*. Indonesia merupakan negara kekuatan menengah namun geraknya berfokus pada penguatan status di kawasan Regional. Sedangkan Korea Selatan bersifat ambisius dalam mencapai kekuatan menengah dan dalam perkembangannya berfokus pada lingkup global.

Artikel ini mendukung penelitian mengenai kapabilitas negara melalui perbedaan latar belakang antara Indonesia dan Korea Selatan dalam mencapai *middle power*. Artikel ini memberikan pemahaman mengenai Indonesia dan Korea Selatan dalam konsep *middle power* melalui peran masing-masing negara. Faktor historis merupakan pendorong munculnya negara-negara tersebut menjadi kekuatan menengah.

1.4.4 Zulkarnian, Muthia; Diplomasi Indonesia dan Korea Selatan di Bidang Kerja sama Pertahanan tahun 2008-2014 (JOM FISIP, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2018)

Artikel ini membahas mengenai diplomasi Indonesia terhadap Korea Selatan dalam kerja sama pertahanan untuk periode 2008-2014. Implementasi hubungan kedua negara secara garis besar terdiri dari kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, operasi bersama dan industri pertahanan. Ancaman domestik dan internasional mendorong hubungan pertahanan.

Hasil penelitian artikel adalah diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan terjadi karena membangun kepercayaan satu sama lain. Implementasi CBM adalah kerja sama di bidang militer dan pertahanan. Selain itu, perihal ini dipengaruhi oleh situasi perimbangan kekuasaan antar negara-negara besar yang tidak pasti.

Artikel ini memberikan batasan pada penelitian dalam menggunakan konsep diplomasi pertahanan. Penelitian memberikan pembaharuan mengenai diplomasi pertahanan Indonesia-Korea Selatan yang ditinjau dari kerja sama industri pertahanan. Kerja sama pengembangan bersama KF-X/IF-X sebagai salah satu turunan dari diplomasi pertahanan Indonesia, diharap dapat melengkapi diplomasi pertahanan Indonesia-Korea Selatan secara komprehensif.

1.4.5 Richard A. Bitzinger. (2017). *Arming Asia : Technonationalism and Its Impact on Local Defense Industries*. “The future of military tehnonationalism in Asia”.

Permasalahan yang diteliti buku ini adalah upaya kemandirian produksi senjata beberapa negara di Asia. Bitzinger membagi beberapa negara di Asia menjadi negara produsen tingkat pertama, negara produsen tingkat dua dan negara produsen tingkat tiga. Bitzinger menggunakan *technonationalism* untuk

menjelaskan motif negara-negara asia mencanangkan kemandirian dalam sektor industri pertahanan mengenai geopolitik dan strategi otonomi.

Hasil analisis pendekatan *technonationalism* bahwa untuk membangun industri pertahanan cenderung mengalami kegagalan khususnya pada negara di Asia-Pasifik. Faktor produsen yang tertutup cenderung tertinggal dari produsen tingkat pertama. *Technonationalism* dapat digunakan secara optimal dengan kerja sama industri dan pemerintah untuk manajemen dana, penelitian dan pengembangan serta memperluas pasar.

Buku ini akan mendukung data mengenai garis besar kapabilitas Korea Selatan dan Indonesia dalam membangun industri pertahanan dan pemetaan negara-negara di Asia. Pembeda penelitian dari buku ini adalah penjelasan mengenai tujuan dan dampak diplomasi pertahanan terhadap Indonesia. Penelitian ini akan melengkapi pembahasan dalam buku yang menjelaskan dinamika hubungan antara negara-negara di Asia terhadap lingkup regional.

1.5 Kerangka Konseptual

Konsep merupakan abstraksi yang mewakili objek, sifat, atau suatu fenomena tertentu. Fungsi konsep dalam karya David dan Chava Nachmias antara lain berperan penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran, memperkenalkan sudut pandang, mengorganisasikan gagasan dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi, serta menjadi dasar untuk membangun teori.^{vii} Oleh sebab itu, kerangka konseptual adalah rancangan yang berisi definisi-definisi untuk menggambarkan konsep dengan menggunakan konsep-

konsep lain guna memudahkan dalam analisis penelitian dan memetakan permasalahan.

Penelitian menggunakan pendekatan konstruktivisme, diplomasi pertahanan dan level analisis *state actor*. Oleh karena itu, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1.5.1 Konsep Konstruktivisme

Fenomena dalam hubungan internasional (seperti *foreign policy*, diplomasi, perang, permusuhan dan isu-isu *non-traditional*) merupakan hasil dari konstruksi sosial para aktor global politik. Pemahaman ini merupakan kritik terdapat turunan dari teori arus utama berupa *neo neo* yang menitikberatkan pada aspek materiil sebagai determinan suatu negara dalam bertindak. Konstruktivisme mempertimbangkan aspek ideasional yang mencakup nilai dan norma yang memandu bagaimana negara berperilaku. Berikut beberapa tokoh yang dapat memberi gambaran aspek penting dalam konstruktivisme :

Tabel 1. 1 Tokoh-tokoh Konstruktivis

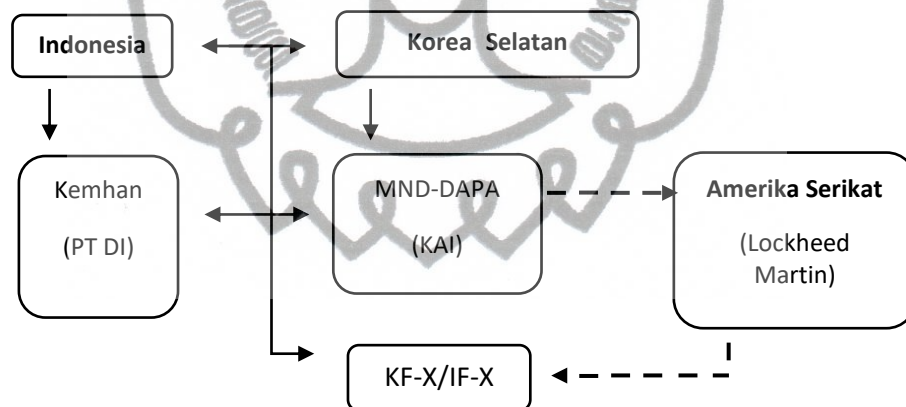
Nama ahli	Pandangan konstruktivisme
Kratochwil	Segala hal terkait tindakan aktor internasional cenderung dibentuk oleh alasan praktis melalui proses pembelajaran dan interaksi antar subjek yang dituntun oleh kepentingan, identitas, maksud, serta bahasa.
Nicholas Onuf	Pendekatan dalam memandang hubungan sosial politik yang dipengaruhi oleh unsur maksud, identitas, dan alat

	komunikasi atau bahasa, serta kepentingan. Pentingnya simbol-simbol Bahasa sebagai media dalam membentuk persepsi hubungan antar subjek yang dapat membentuk pertemanan atau permusuhan.
Alexander Wendt	Politik global dituntun oleh ide, norma dan nilai yang diyakini para aktor yang terdistribusikan antar subjek. Proses sosialisasi dan pembelajaran dari “persaingan” menjadi “kerja sama” terdiri atas saling ketergantungan, nasib yang sama, kesamaan identitas, dan sikap menahan diri.
Martha Finnemore	Proses sosialisasi dan pembelajaran tentang norma dan nilai baru yang dikembangkan oleh organisasi internasional mendorong negara untuk mengubah kepentingan nasionalnya dari yang bersifat sempit dan egoistik menjadi kepentingan yang berdimensi luas dan diterima secara global.
Peter Joachim Katzenstein	Identitas aktor yang dibentuk melalui proses interaksi antar subjek lebih menentukan konstruksi kebijakan keamanan nasional negara. Faktor konteks kultural-institusional dan identitas kolektif determinan bagi keamanan nasional suatu negara.

Sumber : Bob Sugeng Hadiwinata. *Konstruktivisme: pentingnya norma, kepentingan, identitas, dan intensi dalam hubungan internasional*. Halaman 260-282.

Berdasarkan pandangan para tokoh diatas, terdapat kesamaan pemahaman mengenai konstruktivisme antara lain adanya kepentingan dan identitas, intensi, dan bahasa. Aktor-aktor mengkonstruksi kepentingan dan identitasnya melalui proses sosialisasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Proses pemahaman antar subjek menciptakan ide-ide yang kolektif kemudian menghasilkan hak dan kewajiban baru. Perihal tersebut menimbulkan peluang transformasi melalui bahasa sebagai media dalam membentuk persepsi antar subjek yang kemudian membentuk pola pertemanan atau permusuhan.

Gambar 1. 1 Peta Hubungan Aktor-aktor dalam Kerja Sama Pengembangan Bersama KF-X/IF-X



Sumber : diolah penulis

Gambar diatas menunjukkan hubungan antar aktor yang terlibat dalam kerja sama pengembangan KFX/IFX. Pemerintah Indonesia terdiri atas Kementerian Pertahanan yang didalamnya terdapat lembaga Komite Kebijakan Industri Pertahanan untuk urusan pengadaan senjata. Dirgantara Indonesia merupakan industri penerbangan sebagai pihak penerima dan pengolah.

Pemerintah Korea Selatan terdiri atas departemen pertahanan nasional dengan lembaga khusus bernama DAPA yang mengatur tentang ekspor-impor senjata Korea Selatan. KAI adalah industri penerbangan Korea Selatan yang secara tidak langsung melibatkan perusahaan Lockheed Martin asal Amerika Serikat untuk keperluan pengembangan KF-X melalui offset F-35 dengan Korea Selatan. KAI sebagai kontraktor utama, pengolah, dan pengirim.

Konstruktivisme dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dibidang pertahanan. Analisis ini mencakup aspek penting konstruktivisme, yakni proses sosialisasi dan pembelajaran antar subjek. Pembagian sub bab dalam bab 3 berupa pembahasan bertujuan untuk memudahkan analisis tindakan Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan.

1.5.2 Diplomasi Pertahanan

G. R. Berridge menyatakan bahwa diplomasi pada dasarnya adalah kegiatan politik dengan sumber daya yang baik dan terampil sebagai unsur utama kekuasaan bertujuan memungkinkan negara untuk mengamankan tujuan kebijakan luar negerinya tanpa terpaksa, propaganda, atau hukum dengan cara berkomunikasi antara agen diplomatik profesional dan pejabat lainnya yang dirancang untuk mengamankan perjanjian.^{viii}

Di sisi lain, diplomasi pada pertahanan semakin berkembang pasca perang dingin mengakibatkan kegiatan diplomasi mengalami pergeseran. Jenis interaksi para aktor pada tingkat bilateral dan multilateral bervariasi mulai dari antara perusahaan multinasional, negara, dan organisasi non pemerintah. Selanjutnya,

praktik diplomasi pertahanan tidak hanya mengenai penggunaan dalam militer dan pengaturan kerja sama antara negara anggota pakta pertahanan tetapi juga kerja sama dengan membangun kemitraan.

Adapun diplomasi pertahanan menurut Emilio dalam *The Oxford Handbook Modern Diplomacy*, digunakan Inggris dalam kebijakan pertahanan strategisnya guna memperkuat pertahanan dan teknologi melalui kerja sama pertahanan untuk meringankan beban negara.^{ix} Tujuannya adalah mencari perimbangan antara peningkatan kapabilitas pertahanan, kebutuhan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, dan kemandirian pertahanan.

Strategi diplomasi pertahanan dapat dinilai melalui komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan. Menurut Idil Syawfi, ada tiga jenis utama diplomasi pertahanan :

a. *Defense Diplomacy for Confidence Building Measures*

Diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan negara melalui kerja sama militer. Kegiatan yang dilakukan antara lain kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, pertukaran informasi, deklarasi kerja sama, kesepakatan hubungan baik, dan pembatasan kapabilitas.

b. *Defense Diplomacy for Defense Capabilities*

Diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas secara material dilakukan melalui internal dan eksternal. Kegiatan dari eksternal antara lain bantuan militer, pembelian alutsista atau kredit ekspor, pembangunan pangkalan militer, dan

pemberian payung keamanan dari negara *core* terhadap *semi-phery* dan *periphery*, begitu juga dengan sebaliknya.

c. *Defense Diplomacy for Defense Industry*

Diplomasi pertahanan bertujuan untuk membangun industri pertahanan diharapkan dan mengarahkan negara pada independensi politik dan ekonomi, sehingga menurunkan tingkat interdependensi. Kegiatan diplomasi industri pertahanan beberapa diantaranya, berupa kerja sama strategis antar negara dalam produksi senjata, pengembangan dan penelitian senjata, dan pemberian lisensi.

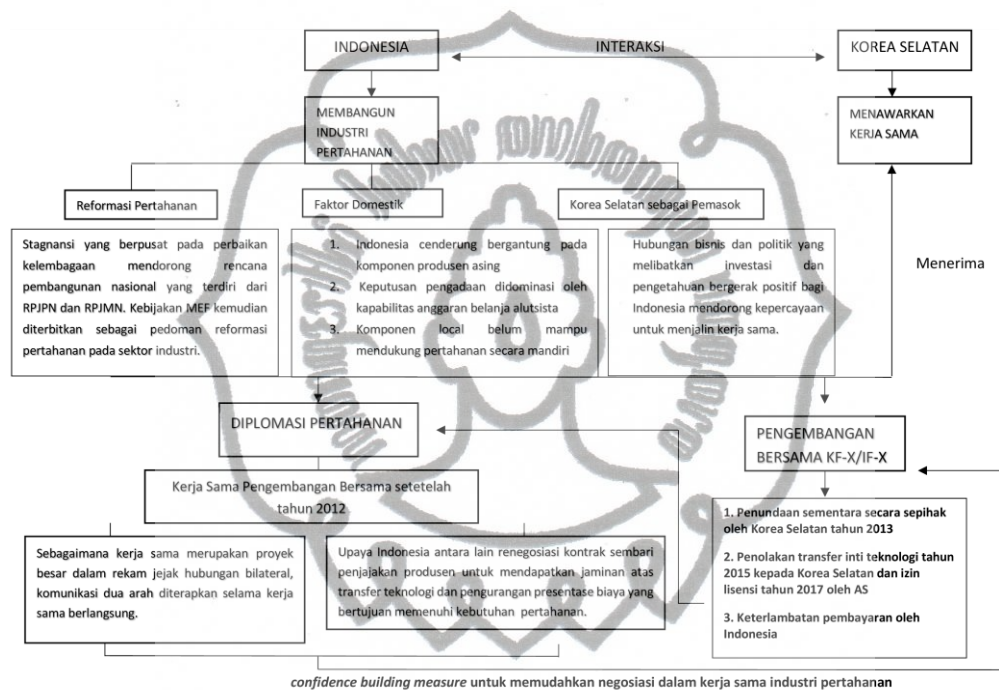
Kegiatan lainnya dapat berupa investasi dalam industri pertahanan dan transfer teknologi. Pada akhirnya diplomasi pertahanan bertujuan untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat didalam kerja sama.

Pencarian mitra untuk produksi senjata melalui *Joint Venture*, logistik dan sistem penawaran untuk angkatan bersenjata dalam diplomasi pertahanan, disebabkan oleh adanya dua kepentingan yang mendominasi. Negara yang memiliki sistem dan teknologi yang tinggi berada di posisi pengekspor *know-how* dan produk. Sedangkan bagi negara yang melakukan modernisasi dan transformasi angkatan bersenjata, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh informasi dan beradaptasi dengan tren dunia.^x

Kerja sama pengembangan bersama jet tempur KF-X/IF-X merupakan praktik diplomasi pertahanan Indonesia melalui kegiatan perjanjian bilateral

pertahanan yang didalamnya melibatkan industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Konsep ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya Indonesia dibidang industri pertahanan untuk mencapai kepentingan negara, khususnya terhadap Korea Selatan.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menyajikan gambaran secara rinci mengenai fenomena yang diteliti kemudian berupaya mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, cermat, dan lengkap. Penulis menjelaskan mengenai analisis kebijakan luar negeri Indonesia dengan Korea Selatan dalam kerja sama

pengembangan bersama KF-X/IF-X sebagai bentuk pelaksanaan dari diplomasi pertahanan Indonesia.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui telaah informasi yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan, video, dan catatan-catatan. Data juga berasal dari situs resmi pemerintah Indonesia dan Korea Selatan serta situs *online* yang kredibel. Penulis menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian. Data kualitatif merupakan sumber yang berbentuk deskripsi dan memuat penjelasan mengenai proses yang terjadi dalam suatu fenomena.

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari 2 sumber antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan kumpulan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan oleh penulis untuk objek penelitian. Data primer berasal dari situs resmi pihak-pihak yang bersangkutan dalam kajian penelitian. Sumber data sekunder adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari olahan pihak lain seperti lembaga penelitian atau data-data yang diolah instansi lainnya.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Penulis mengolah data untuk penelitian yang bersifat kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu :

- a. Reduksi Data

Penulis menggolongkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diversifikasi oleh penulis. Tahapan reduksi data akan mengurangi data-data yang tidak ada kaitannya dengan batasan-batasan penelitian yang menjadi fokus peneliti.

b. Penyajian Data

Penulis menyajikan data yang bertujuan untuk memungkinkan penulis menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penulis akan melihat relevansi dari data yang disajikan untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menarik kesimpulan atau mengulangi proses tersebut. Penyajian data berfungsi untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penulis melakukan pencarian arti pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi dari data yang disajikan pada tahap sebelumnya. Beberapa kesimpulan tersebut, diverifikasi oleh penulis selama penelitian berlangsung. Hasil analisis yang telah diperoleh dapat digunakan untuk ditindak lebih lanjut.

1.6.4 Hasil yang Ingin Dicapai

Penulis berusaha menjelaskan diplomasi pertahanan Indonesia melalui analisis tindakan-tindakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam dinamika kerja sama pengembangan bersama jet tempur KF-X/IF-X dengan Korea Selatan.

Selain itu, penulis juga berusaha untuk menemukan kaitannya dengan hubungan ekonomi antara kedua negara.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan akan menjelaskan kerangka berpikir dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penelitian. Tujuan kerangka berpikir ini untuk memberikan gambaran tentang analisis yang akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya.

Bab II : PENYAJIAN DATA

Bagian bab II berisikan kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa meliputi pertahanan Indonesia berikut dengan perkembangan dan hambatan industri pertahanan serta mengenai kondisi alutsista udara Indonesia dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Penulis akan menyampaikan hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan dari umum ke khusus, yakni capaian yang sudah dilakukan kedua negara hingga ke partisipasi program KF-X Korea Selatan. Akhirnya, penulis menyampaikan perkembangan kerja sama pengembangan KF-X/IF-X berdasarkan agenda-agenda yang terjadi selama periode 2013-2018.

Bab III : PEMBAHASAN

Penulis akan mengolah data yang telah dipaparkan dalam Bab II dan menambahkan serta mencoba memaparkan jawaban dari pertanyaan bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan melalui kerja sama

pengembangan bersama KF-X/IF-X periode 2013-2018, motif pemilihan Korea Selatan sebagai pemasok juga analisis implementasi diplomasi pertahanan.

Bab IV : PENUTUP

Penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran mengenai penelitian dalam bagian penutup.

ⁱ Dinshaw Mistry, "Review Essay Military Modernization in Asia", Vol. 2, 1(2006) : 59-62.

ⁱⁱ "Indonesia", Encyclopedia, diakses 25 Mei 2019,

<https://www.encyclopedia.com/places/asia/indonesian-political-geography/indonesia>

ⁱⁱⁱ Badan Pusat Statistik, "Tabel Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi Militer (miliar rupiah), 2005-2020" diakses 7 Desember 2020,

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/13/1310/tabel-anggaran-belanja-pemerintah-pusat-berdasarkan-fungsi-miliar-rupiah-2005-2020.html>

lihat juga laporan,

"Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014", diakses 7 Desember 2020,

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/nk%20dan%20apbn%202014%20full_0.pdf

^{iv} Jun Ji-Hye, "Korea Starts KF-X Fighter Development", 21 Januari 2016, diakses pada 5 Desember 2018,

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/01/116_196052.html

^v Bradley Perret, "List of KF-X opponents Grows, Aviation Week & Space Technology", 18 Februari 2013, diakses pada 14 November 2018,

<https://aviationweek.com/awin/list-kf-x-opponents-grows>

^{vi} Kim Hyo-Jin, "Indonesia Factor may postpone KF-X Project", 1 November 2017, diakses pada 7 Desember 2018,

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/11/356_238625.html

^{vii} Mas'ood, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, (Jakarta :PT Pustaka LP3S,1994), 95.

^{viii} G.R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*, (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 1.

^{ix} Juan Emilio Cheyre, "Defenxe Diplomacy", dalam *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, ed. Andrew F. Cooper, George Heine, dan Ramesh Thakur, (Oxford : Oxford University Press, 2013), 2.

^x Cheyre, *op. cit.*, 9.